

IAP DKI: Penataan Ulang, Kunci Solusi Tragedi Plumpang

Jakarta – Musibah kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, merupakan tragedy of open access akibat pembiaran yang terjadi selama puluhan tahun. Di satu sisi, PT Pertamina (Persero) tidak menjaga aset miliknya. Pada saat yang sama, masyarakat telah membangun rumah di atas lahan yang bukan miliknya.

“Musibah ini merupakan dampak dari adanya kesalahan bersama yang kita diamkan selama berpuluh-puluh tahun. Upaya penyelesaian masalah ini tidak langsung ke akar persoalan. Yang ada hanya solusi yang dianggap paling populer,” kata Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) DKI Jakarta, Adhamaski Pangeran, dalam siaran persnya, Rabu, 8 Maret 2023.

Menurut Adhamaski, kita tidak perlu melihat ke belakang supaya persoalan sengketa lahan dan permukiman tidak layak huni di wilayah Kampung Tanah Merah, Plumpang, dapat dituntaskan secara baik. Pasalnya, berdasarkan data IAP DKI Jakarta tahun 2021, area tersebut dihuni tidak kurang dari 9.234 kepala keluarga (KK) atau sekitar 34 ribu jiwa yang bermukim di lahan seluas 81 hektar. “Kampung Tanah Merah merupakan kawasan terpadat, mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi se-Asia. Sayangnya, jalan yang ada juga sangat terbatas sehingga menyulitkan aksesibilitas pemadam kebakaran (damkar),” tegasnya.

Saat ini berkembang wacana dua alternatif solusi, yakni relokasi Depo Pertamina maupun relokasi masyarakat. Namun kemudian bagi IAP DKI Jakarta, keduanya tidak bisa dipisah. Opsi alternatif relokasi Depo Pertamina harus tetap dibarengi dengan program penataan ulang kawasan permukiman di Kampung Tanah Merah.

Penataan ulang Kampung Tanah Merah mesti dilakukan. Bagaimana pun, 34 ribu jiwa adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk bermukim sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945. Mereka telah menempati dan bersusah payah membangun rumah secara swadaya. “Prinsipnya penataan ulang Kampung Tanah Merah adalah menggeser, bukan menggusur, yang harus diikuti dengan reforma agraria,” jelas Adhamaski.

Peristiwa kebakaran ini secara jelas juga menggambarkan situasi yang tidak aman di kawasan tersebut. "Negara harus hadir dalam tata ulang di Kampung Tanah Merah. Apalagi, kawasan itu tercatat masih merupakan tanah negara," ujarnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 April 1976, Tanah Merah adalah milik negara dengan status hak guna bangunan atas nama Pertamina. Total tanah negara di kawasan tersebut seluas 153 ha. Dari total luas lahan tersebut, Depo Plumpang berdiri di area seluas 72 ha. Sedangkan sisanya sebesar 81 ha ditempati oleh masyarakat.

"Tragedi Plumpang akibat pembiaran yang terjadi bertahun-tahun ini menyiratkan betul absennya perencanaan jangka panjang dan pengendalian tata ruang," kata Adhamaski.

Urgensi Revisi Perda RTRW

Lebih jauh Adhamaski berpendapat, potret sengketa ruang yang terjadi di Plumpang merupakan efek puncak gunung es. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku di Jakarta saat ini seharusnya menjabarkan dan memastikan fungsi kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bekerja sesuai rencana. Tapi, RDTR ini justru mendahului beleid yang lebih tinggi, yakni RTRW. Padahal RTRW berfungsi sebagai kompas pembangunan Jakarta. Hal ini membuat seakan buffer zone di sekitar objek vital negara menjadi hilang.

"Secara prinsip RTRW mengatur fungsi kawasan, sedangkan RDTR memastikan fungsi tersebut benar-benar ada. Jadi, penting sekali Kota Jakarta memiliki RTRW ditengah keberadaan RDTR yang sudah sangat akomodatif," kata Adhamaski.

Ke depan IAP DKI Jakarta berharap agar perencanaan dan pengendalian tata ruang menjadi panglima pembangunan, sebagai arah pembangunan dan memastikan tujuan pembangunan tersebut bisa terlaksana.

Narahubung:

Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) DKI Jakarta

Adhamaski Pangeran

08567206306

Tentang IAP DKI Jakarta

IAP adalah asosiasi profesi perencana wilayah dan kota yang tertua, terbesar, dan telah terakreditasi. Berdiri sejak tahun 1971, IAP berfungsi sebagai wadah pembinaan profesi, komunikasi, penelitian dan pengembangan, konsultasi, dan koordinasi antara ahli perencanaan wilayah dan kota. IAP DKI Jakarta sebagai bagian dari IAP, memiliki anggota yang berkiprah diberbagai bidang keprofesian seperti praktisi perencana kota, akademisi diberbagai perguruan tinggi negeri/swasta, peneliti pada non-government organization di dalam maupun luar negeri, asosiasi dunia usaha, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat Pemerintah Daerah maupun Nasional.

Salam Hangat Penuh Semangat,

Pengurus Provinsi DKI Jakarta
Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)
JL. Pengadegan Timur 1, No.30
Apartemen Pancoran Riverside
Tower 1C blok ruko 02